

ABSTRAKSI

PERANAN DINAS PERHUBUNGAN UNTUK MENINGKATKAN DISIPLIN LALU LINTAS DALAM KAITANNYA DENGAN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

(Study Kasus Dinas Perhubungan Pemerintahan Kabupaten Deli Serdang)

OLEH

H.M. RIZAL

NPM : 98 840 0113

BIDANG HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

Lalu lintas dan angkutan jalan memiliki peranan yang sangat penting dan strategis sehingga penyetengarannya dikuasai oleh negara, dan pembinaannya dilakukan oleh Pemerintah dengan tujuan untuk mewujudkan lalu lintas dan angkutan jalan yang selamat, aman, cepat, lancar, tertib dan teratur, nyaman dan efisien, mampu memadukan transportasi lainnya, menjangkau seluruh pelosok wilayah daratan, untuk menunjang pemerataan, pertumbuhan dan stabilitas sebagai pendorong, penggerak dan penunjang pembangunan nasional dengan biaya yang terjangkau oleh daya beli masyarakat. Salah satu lembaga yang sangat berkepentingan dengan disiplin lalu lintas ini adalah Dinas Perhubungan.

Jadi maksud penelitian ini adalah tentang keberadaan Dinas Perhubungan Kabupaten Deli Serdang sebagai suatu lembaga yang berwenang melakukan penindakan disiplin berlalu lintas dihubungkan dengan fungsi-fungsi hukum administrasi negara.

Dengan adanya uraian tersebut adapun yang menjadi alasan penulis untuk memilih judul skripsi tersebut di atas adalah sebagai berikut :

1. Penulis merasa tertarik karena sesuai dengan tugas yang dibebankan pemerintah kepada penulis sehingga penulis ingin memperdalam ilmu pengetahuan melalui pembahasan skripsi ini.
2. Penulis tertarik karena berbagai kasus mengenai penegakan disiplin berlalu lintas kebanyakan ditinjau dari hukum pidana sehingga amatlah menarik untuk dibahas dari Hukum Administrasi Negara.

Adapun permasalahan pokok di dalam Skripsi ini adalah sebagai berikut : " Sejauhmana tindakan yang diambil oleh Dinas Perhubungan jika angkutan mobil barang memuat melebihi muatan yang dibenarkan ".

Setelah dilakukan penelitian maka dapat diketahui :

1. Keberadaan dan kehadiran Dinas Perhubungan Kabupaten Deli Serdang adalah merupakan suatu upaya Pemerintah Pusat, melalui daerah untuk melaksanakan tugas-tugas pengawasan pemaknaan jalan raya dan mobil angkutan yang melintas di atasnya dengan sistem desentralisasi dimana pembentukannya diserahkan kepada Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara, dan selanjutnya diserahkan

kepada Kepala Daerah Tingkat II Kabupaten Deli Serdang agar tercapai dan terciptanya suatu hasil guna dan daya guna yang optimal dalam bidang pekerjaan pengawasan atas pemakaian jalan raya serta mobil angkutan yang melintas di atasnya itu sendiri sehingga dengan demikian jalan raya dimaksud akan dapat dipergunakan oleh pengguna jalan raya secara maksimal.

2. Dalam melaksanakan tugas-tugas tersebut, khususnya tentang penertiban terhadap pemakai jalan bagi mobil angkutan, Dinas Perhubungan Kabupaten Deli Serdang ini memfungsikan jembatan timbang sebagai suatu sarana atau alat dalam menjalankan tugasnya. Fungsi jembatan timbang dalam hal ini adalah untuk mengetahui apakah barang yang di bawa oleh mobil angkutan tidak melewati toleransi yang diberikan.
3. Pelaksanaan pengawasan jalan raya serta berialu lintas menjadi penting dalam hubungannya dengan pengawasan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Deli Serdang terhadap pemakaian jalan raya, baik itu dengan melihat ketahanan sebuah ruas jalan dan juga angka kecelakaan yang terjadi di atasnya. Ketahanan atas sebuah jalan raya dapat diperhatikan apabila kadar berat yang melintas di atasnya merupakan ukuran berat yang diperbolehkan, tetapi apabila ukuran berat yang melintas di atasnya melebihi kemampuannya maka jalan raya tersebut akan cepat rusak. Sedangkan pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan jalan raya tersebut memakan biaya yang tidak sedikit sehingga harus ditentukan di dalam suatu Anggaran Perbelanjaan suatu daerah.

